

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA KEGIATAN

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Administrasi Pemerintahan Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan. Secara umum capaian kinerja kegiatan berhasil dengan baik. Rincian capaian kinerja kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input : Dana	Rp	3.500.000	1.112.054	31,77
Output : Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100
Outcome : Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100

Komunikasi dan sumberdaya listrik adalah salah satu sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan di perkantoran. Pada tahun 2018, dari anggaran sebesar Rp. 3.500.000,00 Bagian Administrasi Pemerintahan telah membelanjakan sebesar Rp. 1.112.054,00 untuk keperluan tersebut.

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 bahwa di setiap SKPD harus ada petugas pengelola administrasi keuangan khusus Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati sedangkan PPTK dan PPK ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input : Dana	Rp	26.520.000	22.668.000	85,48
Output : Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	Orang	3	3	100
Outcome : Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100

Di Bagian Administrasi Pemerintahan terdapat 3 (tiga) orang petugas pengelola administrasi keuangan yang terdiri dari : bendahara, staf pengelola administrasi keuangan dan pejabat penatausahaan keuangan (PPK). Alokasi dana Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan digunakan untuk dua sub kegiatan diantaranya adalah belanja pegawai, dan telah diberikan kepada yang bersangkutan.

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Tidak dapat dihindari bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan di perkantoran memerlukan sarana berupa penyediaan alat tulis kantor. Bagian Administrasi Pemerintahan telah merealisasikan 98,52% dari target selama tahun 2018.

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input : Dana	Rp	5.000.000	4.926.000	98,52
Output : Jumlah dan jenis peralatan kerja yang disediakan	Paket	1	1	100
Outcome : Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input : Dana	Rp	5.000.000	4.990.000	99,80
Output : Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Buah Buku	200 buah 190 buku	200 buah 190 buku	100
Outcome : Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100

Penyelenggaraan kegiatan di perkantoran memerlukan sarana berupa penyediaan barang cetakan dan penggandaan seperti stopmap, lembar Disposisi, Kartu Kendali dan blangko lampiran SPPD. Tahun 2018 Bagian Administrasi Pemerintahan telah membelanjakan sebesar Rp. 4.990.000,00 untuk keperluan tersebut.

5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input : Dana	Rp	8.600.000	8.600.000	100
Output : Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	3	3	100
Outcome : Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100

Pelaksanaan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di Bagian Administrasi Pemerintahan selama tahun anggaran 2018 berupa 2 (dua) unit Printer EPSON L 3110 dan 1 (satu) buah Gorden.

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan di Bagian Administrasi Pemerintahan, dengan pengadaan ini maka diharapkan mampu meningkatkan informasi yang selalu terbaharui.

Pada tahun 2018, Bagian Administrasi Pemerintahan telah membelanjakan sebesar Rp. 3.380.000,00 untuk keperluan tersebut.

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input : Dana	Rp	3.400.000	3.380.000	99,41
Output : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Eksemplar buku	365 4	365 4	100
Outcome : Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100

7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input : Dana	Rp	88.001.500	88.001.500	100
Output : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kali	34	34	100
Outcome : Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100

Dapat diketahui bahwa semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu mengadakan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah. Dalam pelaksanaannya petugas tersebut mendapatkan uang harian dan biaya transport sebagaimana pedoman umum yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

8. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi perkantoran/Teknis Perkantoran dengan dana sebesar Rp. 26.200.000,00 dalam setahun.

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input : Dana	Rp	26.200.000	25.366.632	96,82
Output : Waktu penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran/Teknis perkantoran	Orang	2	2	100
Outcome : Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100

9. Penyediaan Jasa Administrasi Barang.

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input : Dana	Rp	4.000.000	4.000.000	100
Output : Waktu penyediaan jasa administrasi barang	Orang	2	2	100
Outcome : Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100

Pedoman pengelolaan administrasi barang telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Mengingat jumlah barang yang dikelola di Bagian Administrasi Pemerintahan tidak terlalu banyak, maka dengan pertimbangan efisiensi cukup dikelola oleh dua orang petugas. Kepada petugas pengelola administrasi barang tersebut diberikan honorarium sebesar Rp. 4.000.000,00 dalam setahun.

10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input : Dana	Rp	12.000.000	11.962.500	99,69
Output : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kali	41	41	100
Outcome : Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100

Dapat diketahui bahwa semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu mengadakan rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah. Dalam pelaksanaannya petugas tersebut mendapatkan uang harian dan biaya transport sebagaimana pedoman umum yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input : Dana	Rp	12.500.000	10.366.272	82,93
Output : Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Unit	4	4	100
Outcome : Cakupan layanan sarana dan prasarana dan aparatur	%	100	100	100

Sarana yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dapat berupa kendaraan dinas. Kendaraan dinas ini sangat diperlukan ketika ada kegiatan yang bersifat *mobile*. Agar usia pakai kendaraan dinas bisa berumur panjang maka diperlukan pemeliharaan yang memadai dan kontinyu antara lain berupa servis kendaraan, penggantian suku cadang, belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas serta biaya surat tanda kendaraan bermotor. Pada tahun 2018 telah dianggarkan dana sebesar Rp. 12.500.000,00 untuk biaya pemeliharaan 1 mobil dan 3 sepeda motor dinas dan realisasi sebesar Rp. 10.366.272,00.

12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input : Dana	Rp	4.500.000	1.907.000	42,38
Output : Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Unit	71	30	42,25
Outcome : Cakupan layanan sarana dan prasarana dan aparatur	%	100	42,25	42,25

Disamping pemeliharaan kendaraan dinas, pada tahun 2018 disediakan pula biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa servis mesin ketik, servis AC, CPU, monitor computer, printer, *notebook*, telepon, mesin fax, ganti kunci *filling cabinet*, dan perbaikan kursi lipat.

13. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Perangkat Daerah.

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input : Dana	Rp	10.000.000	7.156.000	71,56
Output : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	2	2	100
Outcome : Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengamanatkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk memberikan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Bendahara Umum Daerah.

Penyusunan laporan tersebut dilaksanakan akhir tahun anggaran sehingga perkembangan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dapat dimonitor oleh Kepala Daerah dengan cermat.

14. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input : Dana	Rp	5.000.000	4.947.000	98,94
Output : Jumlah laporan keuangan semesteran	Laporan	1	1	100
Outcome : Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100

Penyusunan laporan tersebut dilaksanakan secara berkala setiap semesteran sehingga perkembangan penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD dapat dimonitor oleh Kepala Daerah dengan cermat.

15. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input : Dana	Rp	5.000.000	2.576.500	51,53
Output : Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Laporan	1	1	100
Outcome : Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100

Penyusunan laporan tersebut dilaksanakan secara berkala setiap akhir tahun sehingga perkembangan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD dapat dimonitor oleh Kepala Daerah dengan cermat.

16. Penyusunan LAKIP.

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input : Dana	Rp	5.000.000	4.908.000	98,16
Output : Jumlah laporan Lakip	Laporan	1	1	100
Outcome : Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan SKPD untuk menyusun suatu laporan kinerja pemerintah daerah sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD baik kepada masyarakat maupun Pemerintah Pusat.

17. Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan.

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input : Dana	Rp	10.000.000	8.792.000	87,92
Output : Jumlah laporan keuangan bulanan	Laporan	12	12	100
Outcome : Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100

Penyusunan laporan tersebut dilaksanakan secara berkala setiap bulanan sehingga perkembangan penyusunan pelaporan keuangan bulanan SKPD dapat dimonitor oleh Kepala Daerah dengan cermat.

18. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input : Dana	Rp	50.000.000	41.627.000	83,25
Output : Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja DPR/DPRD/pejabat negara di kab kediri dalam 12 bulan	Kali	12	13	100
Outcome : Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	%	100	100	100

Sebagaimana diketahui bahwa di era desentralisasi ini, kedudukan antar tingkatan pemerintahan adalah sejajar dan masing-masing daerah dapat berkreasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lokal yang dihadapi. Hal ini memungkinkan bagi suatu daerah untuk belajar dan bertukar pengalaman dengan daerah lainnya.

19. Penunjang Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input : Dana	Rp	35.000.000	25.000.000	71,43
Output : Terlaksananya program APKASI dan program FORSESDASI	Kontribusi	2	1	50
Outcome : Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	%	100	50	50

20. Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi proses penetapan dan penegasan Batas Daerah Kabupaten Kediri dengan daerah yang berbatasan.

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input : Dana	Rp	42.000.000	40.836.800	97,23
Output : Tersusunnya Permendagri batas daerah	Rakor Batas Daerah	1	1	100
Outcome : Cakupan pengembangan wilayah perbatasan	%	100	100	100

21. Fasilitas/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik.

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input : Dana	Rp	40.000.000	37.439.500	93,60
Output : Jumlah perjanjian kerja sama hasil tindak lanjut dari kesepakatan bersama	PKS	10	12	120
Outcome : Cakupan peningkatan kerja sama antar pemerintahan daerah	%	100	120	120

Pembentukan kerjasama pada tahun 2018 ini meliputi kerjasama antar daerah maupun dengan pihak ketiga yang difasilitasi oleh Tim Kerjasama Kabupaten Kediri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, prakarsa kerjasama dapat datang dari satu Kepala Daerah yang ditawarkan kepada Kepala Daerah yang lain atau kepada pihak ketiga,

berikutnya bila tawaran kerjasama diterima maka rencana kerjasama dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan kerjasama dan selanjutnya disusun rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat :

- ♦ subjek kerja sama
- ♦ objek kerja sama
- ♦ ruang lingkup kerja sama
- ♦ hak dan kewajiban para pihak
- ♦ jangka waktu kerja sama
- ♦ pengakhiran kerja sama
- ♦ keadaan memaksa
- ♦ penyelesaian perselisihan.

22. Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input : Dana	Rp	65.000.000	60.105.100	92,47
Output : Tersusunnya LPPD Kabupaten Kediri setiap akhir tahun anggaran	Laporan	1	1	100
Outcome : Cakupan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	100	100	100

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat mengamanatkan kepada

Pemerintah Daerah untuk melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah Pusat.

Laporan tersebut dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur yang memuat tentang :

- a. Dasar hukum pembentukan daerah dan gambaran umum daerah meliputi : kondisi geografis, demografis, dan ekonomi.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, meliputi : Visi – Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah serta Prioritas Daerah
- c. Urusan Desentralisasi, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan.
- d. Tugas pembantuan, meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan.
- e. Tugas Pemerintahan Umum, meliputi : kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus, serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

23. Pembuatan dan Pelaksanaan Tata Upacara

Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2018 bertema "Mewujudkan Nawa Cita melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Bersih dan Demokratis", peringatan ini bertujuan untuk merefleksikan kembali makna kebijakan desentralisasi dan otda yang telah dilaksanakan sejak tahun 1999.

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input : Dana	Rp	13.778.500	11.453.000	83,12
Output : Terlaksananya Upacara hari OTODA di Kabupaten Kediri	Kali	1	1	100
Outcome : Cakupan pengembangan wawasan kebangsaan	%	100	100	100

24. Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang.

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input : Dana	Rp	0	0	0
Output : Terlaksananya rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Rakor	0	0	0
Outcome : Cakupan pengembangan data/informasi	%	100	0	0

25. Penyusunan Pembakuan Nama Rupa Bumi

Capaian kinerja kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Input : Dana	Rp	70.000.000	67.908.000	97,01
Output : Terlaksananya rapat koordinasi penyusunan nama-nama rupa bumi unsur buatan dan unsur budaya di wilayah kabupaten Kediri	Rakor	1	1	100
Outcome : Cakupan pengembangan data/informasi	%	100	100	100

Menindaklanjuti pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi menyebutkan pembentukan panitia kabupaten ditetapkan oleh Bupati

B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN

Pengukuran tingkat capaian kinerja sasaran Bagian Administrasi Pemerintahan Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian Rencana Kerja dan tingkat capaian kinerja sasaran dapat diilustrasikan dalam formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Pengukuran Kinerja (PK) sebagaimana terlampir.

Secara umum pencapaian sasaran Bagian Administrasi Pemerintahan Tahun 2018 dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan alokasi anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Tahun 2018, pagu dan realisasi dapat dirinci sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.500.000	1.112.054	31,77
2.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	26.520.000	22.668.000	85,48
3.	Penyediaan alat tulis kantor	5.000.000	4.926.000	98,52
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000	4.990.000	99,80
5.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	8.600.000	8.600.000	100
6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.400.000	3.380.000	99,41
7.	Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	26.200.000	25.366.632	96,82
8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	88.001.500	88.001.500	100
9.	Penyediaan jasa administrasi barang	4.000.000	4.000.000	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12.000.000	11.962.500	99,69
11	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12.500.000	10.366.272	82,93
12	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	4.500.000	1.907.000	42,38
13	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000	7.156.000	71,56
14	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5.000.000	4.947.000	98,94
15	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.000.000	2.576.500	51,53

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
16	Penyusunan LAKIP	5.000.000	4.908.000	98,16
17	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan	10.000.000	8.792.000	87,92
18	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	50.000.000	41.627.000	83,25
19	Penunjang Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	35.000.000	25.000.000	71,43
20	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	42.000.000	40.836.800	97,23
21	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	40.000.000	37.439.500	93,60
22	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	65.000.000	60.105.100	92,47
23	Pembuatan dan Pelaksanaan Tata Upacara	13.778.500	11.453.000	83,12
24	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	0	0	0
25	Penyusunan pembakuan nama rupa bumi	70.000.000	67.908.000	97,01
JUMLAH		550.000.000,00	500.028.858,00	90,91